

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan argumentasi yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil yang belum sesuai. Belum sesuaiya pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga karena kurangnya kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk bisa melaksanakan kebijakan dengan baik.

Analisis implementasi mencatat bahwa empat dari enam indikator *content of Policy* (isi kebijakan) pelaksanaannya belum sesuai, dan tiga dari *context of implementations* (konteks implementasi) pelaksanaan implementasi juga belum sesuai. Adapun faktor belum sesuaiya pelaksanaan disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, edukasi masyarakat, pendampingan dan lainnya. Selain itu, dengan kurang didukungnya peraturan perundang-undangan yang memadai yang hanya memuat prosedur implementasi tanpa penjelasan secara lebih mendetail terkait proses kegiatan implementasi juga menjadi salah satu faktor penghambatnya.

Meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga melalui penerapan prinsip *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang), sudah ada kemajuan dengan peningkatan target pengurangan sampah dan penanganan sampah setiap tahunnya serta berdampak pada pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat

pembuangan akhir (TPA). Namun tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat.

Keberhasilan implementasi TPS 3R di Kabupaten Purbalingga juga bergantung pada beberapa faktor, seperti kesadaran dan partisipasi masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah, serta fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Meskipun ada tantangan dalam hal edukasi masyarakat dan keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah, TPS 3R memberikan peluang untuk mengurangi beban TPA serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal melalui prinsip 3R. Penting untuk terus memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk keberlanjutan program ini di masa depan. Implementasi TPS 3R yang lebih luas dan terpadu diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan pendampingan dan pelatihan lebih lanjut bagi para pengelola dan tenaga kerja TPS 3R Kabupaten Purbalingga agar pengelolaan sampah melalui TPS 3R dapat berjalan dengan lebih

baik dan optimal. Selain itu, diperlukan juga peningkatan jumlah tenaga kerja TPS 3R guna mendukung efisiensi dan efektifitas pengelolaan sampah di TPS 3R.

2. Diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana TPS 3R di Kabupaten Purbalingga mulai dari mesin pemilah sampah, gerobak/mobil angkut sampah, dan gedung/tempat TPS 3R. Bantuan pendanaan juga diperlukan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) guna mencukupi biaya operasional dari TPS 3R.
3. Diperlukan sosialisasi serta edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan Konsep 3R di Kabupaten Purbalingga guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, pemberian akses informasi yang mudah, benar dan akurat juga diperlukan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui kondisi persampahan di Kabupaten Purbalingga.